

## BAB IV

### HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

#### 4.1. Deskripsi Data Penelitian

##### 4.1.1. Deskripsi Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, data didapatkan dengan menyebarkan kuisisioner kepada responden yang memenuhi syarat. Kuisisioner tersebut berisi 5 pertanyaan untuk variabel X1 yaitu insentif pajak, 5 pertanyaan untuk variabel X2 yaitu pengetahuan perpajakan, 7 pertanyaan untuk variabel X3 yaitu sosialisasi pajak, dan 5 pertanyaan untuk variabel Y yaitu kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Kuisisioner disebar kepada 100 responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan skala likert.

Tabel 4. 1 *Skala Pengukuran Likert*

Jawaban	Poin
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat tidak Setuju	1

Sumber : *Data primer yang diolah, 2022*

Pada tabel 4.1 menunjukkan poin dari setiap jawaban, poin tersebut berlaku untuk menghitung setiap variabel, baik variabel X atau variabel bebas dan juga variabel Y atau variabel independent. Penilaian kuisisioner dimulai dari poin 1 sampai 5.

##### 4.1.2. Deskripsi Subyek Penelitian

Subyek dan sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang memiliki usaha di Kota Tangerang Selatan dan juga memiliki NPWP. Kuisisioner disebar sebanyak 148 kuisisioner dan diperoleh kembali sebanyak 148 kuisisioner. Total kuisisioner yang dapat diolah sebanyak 100 kuisisioner dengan kriteria responden yaitu pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan dan juga memiliki NPWP. Berikut merupakan tabel gambaran data sampel penelitian.

Tabel 4. 2 *Data Sampel Penelitian*

No	Keterangan	Kuisisioner yang Disebar	Kuisisioner yang Kembali	Presentase
1	Pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan dan memiliki NPWP	148	148	100%
	Kuisisioner yang Tidak Dapat Diolah	-	-	-
	Kuisisioner yang Dapat Diolah		100/148	68%

Sumber : *Data primer yang diolah, 2022*

Dari tabel 4.2 yang menyajikan data sampel penelitian, dapat dilihat dari 100 kuisisioner yang disebar kepada pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan, jumlah kuisisioner yang kembali adalah 148 kuisisioner dengan presentase 100% kembali. Jumlah kuisisioner yang dapat diolah juga berjumlah 100 dengan presentase 68%.

#### 4.1.3. Deskripsi Identitas Responden

Identitas responden dalam penelitian ini mencakup jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, usia usaha, dan memiliki NPWP pada pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan. Berikut ini merupakan table identitas pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan yang telah diolah dengan menggunakan *IBM SPSS Statistics 26*.

Tabel 4. 3 *Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin*

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	46	46%
2	Perempuan	54	54%
	Jumlah	100	100%

Sumber: *Data primer yang diolah, 2022*

Pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa dari 100 responden, 46 responden berjenis kelamin laki-laki dan 54 responden berjenis kelamin perempuan. Memiliki presentase 46% untuk responden berjenis kelamin laki-laki dan 54% untuk responden berjenis kelamin perempuan. Responden yang merupakan pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan menunjukkan jumlah yang didominasi oleh perempuan.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Presentase
1	<20	5	5%
2	20-25	75	75%
3	26-30	13	13%
4	31-35	2	2%
5	36-40	3	3%
6	41-45	1	1%
7	46-50	0	0%
8	>50	1	1%
	Jumlah	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Tabel 4.4 menunjukkan hasil uji deskripsi responden berdasarkan usia. Pada tabel tersebut terlihat bahwa kelompok usia 20-25 telah mendominasi dengan jumlah responden sebanyak 75 orang dengan presentase 75%. Usia responden <20 tahun sebanyak 5 responden dengan presentase 5%. Kelompok usia 26-30 tahun sebanyak 13 responden dengan presentase 13%. Kelompok usia 31-35 tahun sebanyak 2 responden atau 2%. Kelompok usia 36-40 tahun sebanyak 3 responden dengan presentase 3%. Kelompok usia 41-45 tahun sebanyak 1 responden dengan presentase 1%. Kelompok usia 46-50 tahun tidak ada responden. Kelompok usia >50 tahun sebanyak 1 responden dengan presentase 1%.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1	SMA	65	65%
2	D3	4	4%
3	S1	30	30%
4	S2	1	1%
	Jumlah	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan akhir responden hanya berawal dari SMA sampai tingkat pendidikan akhir jenjang S2. Terdapat 65 responden dengan pendidikan terakhir SMA, 4 orang responden dengan pendidikan terakhir D3, 30 orang responden dengan pendidikan terakhir S1, dan 1 orang responden dengan pendidikan terakhir S2. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan didominasi oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan akhir SMA.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Deskripsi Berdasarkan Usia Usaha

No	Usia Usaha	Frekuensi	Presentase
1	<5 tahun	85	85%
2	5-10 tahun	7	7%
3	>10 tahun	8	8%
	Jumlah	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Pada tabel 4.6. ditunjukkan bahwa usia usaha terbagi menjadi 3 yaitu <5 tahun, 5-10 tahun, dan >10 tahun. Dari 100 responden terbagi lagi dengan usia usaha <5 tahun dengan presentase sebesar 85%, 5-10 tahun dengan presentase sebesar 7% dan >10 tahun dengan presentase 8%. Dapat disimpulkan bahwa usia usaha dari responden sebagian besar memiliki usia usaha <5 tahun.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Deskripsi Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Frekuensi	Presentase
1	Aksesoris	2	85%
2	ATK	1	1%
3	Digital	1	1%
4	Farmasi	1	1%
5	Jasa	20	20%
6	Kosmetik	3	3%
7	Kuliner	44	44%
8	Otomotif	1	1%
9	Supplier	1	1%
10	Kerajinan Tangan	4	4%
11	Sembako	6	6%
12	Tata Busana	16	16%
	Jumlah	100	100%

Sumber : Data Primer yang Diolah,2022

Pada tabel 4.7 ditunjukkan ada 12 jenis usaha yang berada di Kota Tangerang Selatan, yaitu diantaranya adalah jenis usaha aksesoris dengan 2 responden atau sebesar 2%, jenis usaha ATK dengan 1 responden atau 1%, jenis usaha digital dengan 1 responden atau 1%, jenis usaha farmasi dengan 1 responden atau 1%, jenis usaha jasa dengan 20 responden atau 20%, jenis usaha kuliner dengan 44 responden atau sebesar 44%, jenis usaha otomotif dengan 1 responden atau 1%, jenis usaha supplier dengan 1 responden atau 1%, jenis usaha kerajinan tangan dengan 4 responden atau 4%, jenis usaha sembako dengan 6 responden atau 6%, dan jenis usaha tata busana dengan 16 responden atau 16.

#### 4.1.4. Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif akan memberikan uraian atau deskripsi tentang suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, jumlah, *range*, *skewness* (kemelencengan distribusi) dan kurtosis (Ghozali, 2013). Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah insentif pajak, pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak,

dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel tersebut akan diuji secara statistik deskriptif menggunakan program *IBM SPSS Statistic 26*.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Insentif Pajak	100	8	25	21.57	3.282
Pengetahuan Perpajakan	100	11	25	18.28	3.803
Sosialisasi Pajak	100	7	25	19.20	3.695
Kepatuhan Wajib Pajak	100	5	25	18.15	3.494
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data Primer yang diolah, 2022

Pada tabel 4.8 terlihat bahwa nilai minimum variabel insentif pajak adalah 8 sementara nilai maksimumnya adalah 25 dengan nilai rata-rata (mean) 21.57. Nilai rata-rata sebesar 21.57 mendekati nilai maksimum sebesar 25 membuktikan bahwa insentif pajak yang diberikan kepada pelaku UMKM termasuk pelaku UMKM di Tangerang Selatan berdampak baik. Nilai standar deviasi sebesar 3.282 lebih kecil dari nilai rata-rata sebesar 21.57 yang berarti penelitian ini menunjukkan hasil yang baik.

Variabel selanjutnya adalah pengetahuan perpajakan yang menunjukkan angka minimum 11 dan angka maksimumnya adalah 25 dengan nilai rata-rata (mean) 18.28. Nilai rata-rata sebesar 18.28 mendekati nilai maksimum sebesar 25 membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan mengenai perpajakan pelaku UMKM termasuk pelaku UMKM di Tangerang Selatan sudah baik, selain itu dengan nilai standar deviasi sebesar 3.803 lebih kecil dari nilai rata-rata sebesar 18.28 membuktikan bahwa penelitian ini menunjukkan hasil yang baik.

Variabel sosialisasi pajak menunjukkan angka minimum 7 dan angka maksimumnya 25 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 19.20. Nilai rata-rata sebesar 19.20 mendekati nilai maksimum sebesar 25 dan membuktikan bahwa sosialisasi mengenai pajak pelaku UMKM termasuk pelaku UMKM di Tangerang Selatan sudah baik, nilai standar deviasi sebesar 3.695 lebih kecil dari nilai rata-rata sebesar 19.20 sehingga membuktikan bahwa penelitian ini menunjukkan hasil yang baik.

Variabel selanjutnya adalah kepatuhan wajib pajak dengan nilai minimum 5 dan nilai maksimum 25 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 18.15. Nilai rata-rata sebesar 18.15 mendekati nilai maksimum sebesar 25 dan membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak pelaku

UMKM termasuk Pelaku UMKM di Tangerang Selatan sudah baik, nilai standar deviasi sebesar 3.494 lebih kecil dari nilai rata-rata sebesar 18.15 sehingga membuktikan bahwa penelitian ini menunjukkan hasil yang baik.

#### 4.1.5. Analisis Pernyataan Variabel Insentif Pajak

Berdasarkan kuisioner yang sudah terkumpul, berikut ini adalah tabel yang menjelaskan tanggapan dari seluruh responden atas variabel insentif pajak pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 4. 9 Analisis Jawaban atas Pernyataan Variabel Insentif Pajak

Instrumen	SS	S	N	TS	STS	Skor Aktual	Skor Ideal
1	62	28	9	0	1	450	500
2	64	27	7	0	2	451	500
3	56	30	12	0	2	438	500
4	70	26	2	0	2	462	500
5	39	31	23	4	3	399	500
						2200	2500

Sumber : Data primer yang diolah,2022

Berdasarkan tabel 4.9 hasil analisis variabel insentif pajak (X1), diperoleh total skor 2200 dengan skor terendah 1 dan skor tertinggi 5. Di bawah ini merupakan perhitungan rentang tingkat skor untuk membuat interval kategori variabel insentif pajak.

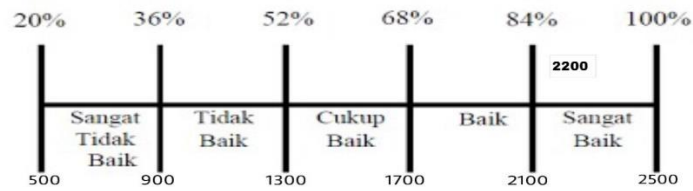
$$\text{Skor minimum} = 100 \times 5 \times 1 = 500$$

$$\text{Skor maksimum} = 100 \times 5 \times 5 = 2500$$

$$\text{Rentang skor} = 2500 - 500 = 2000$$

$$\text{Rentang antar tingkat} = 2000 / 5 = 400$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat dilihat pada gambar di bawah garis kontinum untuk menggambarkan posisi total skor tertinggi berdasarkan interval skor.



Gambar 4. 1 Garis Kontinum Variabel Insentif Pajak

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa variabel insentif pajak berada dalam kategori baik. Skor jawaban dari masing-masing pertanyaan pada variabel insentif pajak dapat dilihat secara lebih lengkap di bawah ini.

Tabel 4. 10 Frekuensi Jawaban Pernyataan XI.1

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	62	62%
Setuju	28	28%
Netral	9	9%
Tidak Setuju	0	0%
Sangat Tidak Setuju	1	1%
Total	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perolehan tanggapan responden atas pernyataan “Insentif pajak atau pengurangan pajak menjadi salah satu fasilitas dari pemerintah yang digunakan di masa krisis untuk membantu para pelaku usaha” sebanyak 62 orang atau 62% responden menyatakan sangat setuju atas pernyataan tersebut, 28 orang atau 28% responden menyatakan setuju, 9 orang atau 9% responden menjawab netral, tidak setuju tidak ada responden, dan 1 orang atau 1% responden menjawab sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang merupakan pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan mendapatkan fasilitas dari pemerintah yaitu berupa insentif pajak yang dapat membantu pelaku usaha.

Tabel 4. 11 Frekuensi Jawaban Pernyataan XI.2

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	64	64%
Setuju	27	27%
Netral	7	7%
Tidak Setuju	0	0%
Sangat Tidak Setuju	2	2%
Total	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2022



Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perolehan tanggapan responden atas pernyataan “Syarat dan ketentuan untuk pengajuan insentif pajak UMKM mudah” sebanyak 64 orang atau 64% responden menyatakan sangat setuju atas pernyataan tersebut, 27 orang atau 27% responden menjawab setuju, 7 orang atau 7% responden menjawab netral, tidak setuju tidak ada responden, dan sebanyak 2 orang atau 2% responden menjawab sangat tidak setuju. Dari tanggapan tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan setuju bahwa syarat dan ketentuan untuk pengajuan insentif pajak UMKM mudah.

Tabel 4. 12 Frekuensi Jawaban Pernyataan X1.3

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	56	56%
Setuju	30	30%
Netral	12	12%
Tidak Setuju	0	0%
Sangat Tidak Setuju	2	2%
Total	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perolehan tanggapan responden atas pernyataan “Pemberian insentif pajak merupakan hal yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak” sebanyak 56 orang atau 56% responden menyatakan sangat setuju atas pernyataan tersebut, 30 orang atau 30% responden menjawab setuju, 12 orang atau 12% responden menjawab netral, tidak setuju tidak ada responden, dan sebanyak 2 orang atau 2% responden menjawab sangat tidak setuju. Dari tanggapan tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan setuju bahwa pemberian insentif merupakan hal yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4. 13 Frekuensi Jawaban Pernyataan X1.4

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	70	70%
Setuju	26	26%
Netral	2	2%
Tidak Setuju	0	0%
Sangat Tidak Setuju	2	2%
Total	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perolehan tanggapan responden atas pernyataan “Sebagai Wajib Pajak, usaha saya sangat terbantu dengan adanya insentif pajak untuk pelaku

UMKM di masa Covid-19” sebanyak 70 orang atau 70% responden menyatakan sangat setuju atas pernyataan tersebut, 26 orang atau 26% responden menjawab setuju, 2 orang atau 2 % responden menjawab netral, tidak setuju tidak ada responden, dan sebanyak 2 orang atau 2% responden menjawab sangat tidak setuju. Dari tanggapan tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan setuju bahwa usaha nya terbantu dengan adanya insentif pajak.

Tabel 4. 14 Frekuensi Jawaban Pernyataan X1.5

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	39	39%
Setuju	31	31%
Netral	23	23%
Tidak Setuju	4	4%
Sangat Tidak Setuju	3	3%
Total	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perolehan tanggapan responden atas pernyataan “Dengan adanya kebijakan insentif pajak untuk UMKM membuat saya termotivasi untuk lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu” sebanyak 39 orang atau 39% responden menyatakan sangat setuju atas pernyataan tersebut, 31 orang atau 31% responden menjawab setuju, 23 orang atau 23 % responden menjawab netral, 4 orang atau 4% responden menjawab tidak setuju , dan sebanyak 2 orang atau 2% responden menjawab sangat tidak setuju. Dari tanggapan tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan setuju bahwa dengan adanya kebijakan insentif pajak untuk UMKM memotivasi untuk lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu.

#### 4.1.6. Analisis Pernyataan Variabel Pengetahuan Perpajakan

Dari kuisisioner yang sudah terkumpul, berikut ini adalah tabel yang menjelaskan tanggapan dari seluruh responden atas variabel pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 4. 15 Analisis Jawaban Atas Pernyataan Variabel Pengetahuan Perpajakan

Instrumen	SS	S	N	TS	STS	Skor Aktual	Skor Ideal
1	25	29	31	14	1	363	500
2	20	36	30	13	1	361	500
3	37	48	12	2	1	418	500
4	19	37	30	13	1	360	500
5	10	31	35	23	1	326	500
						1828	2500

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel hasil analisis variabel pengetahuan perpajakan (X2), diperoleh total skor 1828 dengan skor terendah 1 dan skor tertinggi 5. Di bawah ini merupakan perhitungan rentang tingkat skor untuk membuat interval kategori variabel pengetahuan perpajakan.

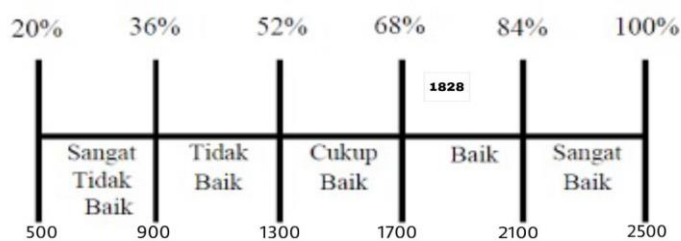
$$\text{Skor minimum} = 100 \times 5 \times 1 = 500$$

$$\text{Skor maksimum} = 100 \times 5 \times 5 = 2500$$

$$\text{Rentang skor} = 2500 - 500 = 2000$$

$$\text{Rentang antar tingkat} = 2000 / 5 = 400$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat dilihat pada gambar di bawah garis kontinum untuk menggambarkan posisi total skor tertinggi berdasarkan interval skor.



Gambar 4. 2 Garis Kontinum Variabel Pengetahuan Perpajakan

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berada dalam kategori baik. Skor jawaban dari masing-masing pertanyaan pada variabel pengetahuan perpajakan dapat dilihat secara lebih lengkap di bawah ini.

Tabel 4. 16 *Frekuensi Jawaban Pernyataan X2.1*

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	25	25%
Setuju	29	29%
Netral	31	31%
Tidak Setuju	14	14%
Sangat Tidak Setuju	1	1%
Total	100	100%

*Sumber : Data primer yang diolah, 2022*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perolehan tanggapan responden atas pernyataan “saya mengetahui fungsi pajak” sebanyak 25 orang atau 25% responden menyatakan sangat setuju atas pernyataan tersebut, 29 orang atau 29% responden menjawab setuju, 31 orang atau 31% responden menjawab netral, 14 orang atau 14% responden menjawab tidak setuju, dan sebanyak 1 orang atau 1% responden menjawab sangat tidak setuju. Dari tanggapan tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan mengetahui fungsi pajak.

Tabel 4. 17 *Frekuensi Jawaban Pernyataan X2.2*

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	20	20%
Setuju	36	26%
Netral	30	36%
Tidak Setuju	13	13%
Sangat Tidak Setuju	1	1%
Total	100	100%

*Sumber : Data primer yang diolah, 2022*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perolehan tanggapan responden atas pernyataan “saya mengetahui adanya pemberlakuan peraturan perpajakan bagi UMKM” sebanyak 20 orang atau 20% responden menyatakan sangat setuju atas pernyataan tersebut, 36 orang atau 36% responden menjawab setuju, 30 orang atau 30% responden menjawab netral, 13 orang atau 13% responden menjawab tidak setuju, dan sebanyak 1 orang atau 1% responden menjawab sangat tidak setuju. Dari tanggapan tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan mengetahui adanya pemberlakuan peraturan perpajakan bagi UMKM.

Tabel 4. 18 *Frekuensi Jawaban Pernyataan X2.3*

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	37	37%
Setuju	48	48%
Netral	12	12%
Tidak Setuju	2	2%
Sangat Tidak Setuju	1	1%
Total	100	100%

*Sumber : Data primer yang diolah, 2022*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perolehan tanggapan responden atas pernyataan “Saya mengetahui tarif pajak UMKM sebesar 0,5%” sebanyak 37 orang atau 37% responden menyatakan sangat setuju atas pernyataan tersebut, 48 orang atau 48% responden menjawab setuju, 12 orang atau 12% responden menjawab netral, 2 orang atau 2% responden menjawab tidak setuju, dan sebanyak 1 orang atau 1% responden menjawab sangat tidak setuju. Dari tanggapan tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan mengetahui tarif pajak UMKM sebesar 0,5%.

Tabel 4. 19 *Frekuensi Jawaban Pernyataan X2.4*

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	19	19%
Setuju	37	37%
Netral	30	30%
Tidak Setuju	13	13%
Sangat Tidak Setuju	1	1%
Total	100	100%

*Sumber : Data primer yang diolah, 2022*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perolehan tanggapan responden atas pernyataan “Saya mengetahui tata cara membayar pajak bagi UMKM” sebanyak 19 orang atau 19% responden menyatakan sangat setuju atas pernyataan tersebut, 37 orang atau 37% responden menjawab setuju, 30 orang atau 30% responden menjawab netral, 13 orang atau 13% responden menjawab tidak setuju, dan sebanyak 1 orang atau 1% responden menjawab sangat tidak setuju. Dari tanggapan tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan mengetahui tata cara membayar pajak bagi UMKM.

Tabel 4. 20 *Frekuensi Jawaban Pernyataan X2.5*

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	10	10%
Setuju	31	31%
Netral	35	35%
Tidak Setuju	23	23%
Sangat Tidak Setuju	1	1%
Total	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perolehan tanggapan responden atas pernyataan “saya paham, dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, membayar, dan melapor sendiri)” sebanyak 10 orang atau 10% responden menyatakan sangat setuju atas pernyataan tersebut, 31 orang atau 31% responden menjawab setuju, 35 orang atau 35% responden menjawab netral, 23 orang atau 23% responden menjawab tidak setuju, dan sebanyak 1 orang atau 1% responden menjawab sangat tidak setuju. Dari tanggapan tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan mengetahui cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri.

#### 4.1.7. Analisis Pernyataan Variabel Sosialisasi Perpajakan

Dari kuisioner yang sudah terkumpul, berikut ini adalah tabel yang menjelaskan tanggapan dari seluruh responden atas variabel sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 4. 21 *Analisis Jawaban atas Pernyataan Variabel Sosialisasi Perpajakan*

Instrumen	SS	S	N	TS	STS	Skor	Skor
						Aktual	Ideal
1	20	45	26	9	0	376	500
2	17	36	30	15	1	351	500
3	10	33	35	17	5	326	500
4	27	41	27	5	0	390	500
5	29	47	18	5	1	398	500
6	27	38	23	10	2	378	500
7	41	46	11	1	1	425	500
						2644	3500

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel hasil analisis variabel sosialisasi perpajakan (X3), diperoleh total skor 2644 dengan skor terendah 1 dan skor tertinggi 5. Di bawah ini merupakan perhitungan rentang tingkat skor untuk membuat interval kategori variabel pengetahuan perpajakan.

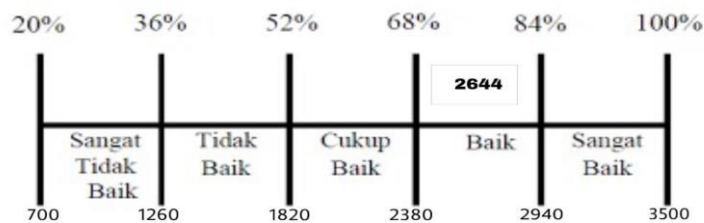
$$\text{Skor minimum} = 100 \times 7 \times 1 = 700$$

$$\text{Skor maksimum} = 100 \times 7 \times 5 = 3500$$

$$\text{Rentang skor} = 3500 - 700 = 2800$$

$$\text{Rentang antar tingkat} = 2800 / 5 = 560$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat dilihat pada gambar di bawah garis kontinum untuk menggambarkan posisi total skor tertinggi berdasarkan interval skor.



Gambar 4. 3 Garis Kontinum Variabel Sosialisasi Perpajakan

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi berada dalam kategori baik. Skor jawaban dari masing-masing pertanyaan pada variabel sosialisasi perpajakan dapat dilihat secara lebih lengkap di bawah ini.

Tabel 4. 22 Frekuensi Jawaban Pernyataan X3.1

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	20	20%
Setuju	45	45%
Netral	26	26%
Tidak Setuju	9	9%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perolehan tanggapan responden atas pernyataan “Saya mengetahui informasi kebijakan insentif dari DJP” sebanyak 20 orang atau 20% responden menyatakan sangat setuju atas pernyataan tersebut, 45 orang atau 45% responden menjawab setuju, 26 orang atau 26% responden menjawab netral, 9 orang atau 9% responden

menjawab tidak setuju, dan tidak setuju tidak ada responden. Dari tanggapan tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan mengetahui informasi kebijakan insentif pajak dari DJP.

Tabel 4. 23 *Frekuensi Jawaban Pernyataan X3.2*

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	17	17%
Setuju	36	36%
Netral	30	30%
Tidak Setuju	15	15%
Sangat Tidak Setuju	1	1%
Total	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perolehan tanggapan responden atas pernyataan “Sosialisasi atau penyuluhan sarana yang tepat untuk memberikan informasi kebijakan insentif pajak” sebanyak 17 orang atau 17% responden menyatakan sangat setuju atas pernyataan tersebut, 36 orang atau 36% responden menjawab setuju, 30 orang atau 30% responden menjawab netral, 15 orang atau 15% responden menjawab tidak setuju, dan 1 orang atau 1% responden menjawab sangat tidak setuju. Dari tanggapan tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan setuju bahwa sosialisasi atau penyuluhan merupakan sarana yang tepat untuk memberikan informasi mengenai kebijakan insentif pajak.

Tabel 4. 24 *Frekuensi Jawaban Pernyataan X3.3*

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	10	10%
Setuju	33	33%
Netral	35	35%
Tidak Setuju	17	17%
Sangat Tidak Setuju	5	5%
Total	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perolehan tanggapan responden atas pernyataan “Informasi mengenai kebijakan insentif pajak diperoleh dengan mudah” sebanyak 10 orang atau 10% responden menyatakan sangat setuju atas pernyataan tersebut, 33 orang atau 33% responden menjawab setuju, 35 orang atau 35% responden menjawab netral, 17 orang atau 17% responden menjawab tidak setuju, dan 5 orang atau 5% responden menjawab sangat tidak



setuju. Dari tanggapan tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan setuju bahwa sosialisasi atau penyuluhan merupakan sarana yang tepat untuk memberikan informasi mengenai kebijakan insentif pajak

Tabel 4. 25 *Frekuensi Jawaban Pernyataan X3.4*

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	27	27%
Setuju	41	41%
Netral	27	27%
Tidak Setuju	5	5%
Sangat Tidak Setuju	0	0%
Total	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perolehan tanggapan responden atas pernyataan “Saya bersedia berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi insentif pajak” sebanyak 27 orang atau 27% responden menyatakan sangat setuju atas pernyataan tersebut, 41 orang atau 41% responden menjawab setuju, 27 orang atau 27% responden menjawab netral, 5 orang atau 5% responden menjawab tidak setuju, dan sangat tidak setuju tidak ada responden. Dari tanggapan tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan setuju untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi insentif pajak.

Tabel 4. 26 *Frekuensi Jawaban Pernyataan X3.5*

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	29	29%
Setuju	47	47%
Netral	18	17%
Tidak Setuju	5	5%
Sangat Tidak Setuju	1	1%
Total	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perolehan tanggapan responden atas pernyataan “Saya antusias dalam mengikuti kegiatan sosialisasi insentif pajak” sebanyak 29 orang atau 29% responden menyatakan sangat setuju atas pernyataan tersebut, 47 orang atau 47% responden menjawab setuju, 18 orang atau 18% responden menjawab netral, 5 orang atau 5% responden menjawab tidak setuju, dan 1 orang atau 1% menjawab sangat tidak setuju Dari

tanggapan tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan setuju dalam berantusias mengikuti kegiatan sosialisasi insentif pajak.

Tabel 4. 27 *Frekuensi Jawaban Pernyataan X3.6*

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	27	27%
Setuju	38	38%
Netral	23	23%
Tidak Setuju	10	10%
Sangat Tidak Setuju	2	2%
Total	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perolehan tanggapan responden atas pernyataan “Saya mengetahui insentif pajak melalui koran, spanduk, billboard, tv, dan radio” sebanyak 27 orang atau 27% responden menyatakan sangat setuju atas pernyataan tersebut, 38 orang atau 38% responden menjawab setuju, 23 orang atau 23% responden menjawab netral, 10 orang atau 10% responden menjawab tidak setuju, dan 2 orang atau 2% menjawab sangat tidak setuju. Dari tanggapan tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan setuju mengetahui informasi mengenai insentif pajak melalui koran, spanduk, billboard, tv, dan radio.

Tabel 4. 28 *Frekuensi Jawaban Pernyataan X3.7*

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	41	41%
Setuju	46	46%
Netral	11	11%
Tidak Setuju	1	1%
Sangat Tidak Setuju	1	1%
Total	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perolehan tanggapan responden atas pernyataan “Saya mengetahui insentif pajak melalui internet seperti website DJP atau media sosial” sebanyak 41 orang atau 41% responden menyatakan sangat setuju atas pernyataan tersebut, 46 orang atau 46% responden menjawab setuju, 11 orang atau 11% responden menjawab netral, 1 orang atau 1% responden menjawab tidak setuju, dan 1 orang atau 1% menjawab sangat

tidak setuju Dari tanggapan tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan setuju mengetahui informasi mengenai insentif pajak melalui website DJP atau media sosial.

#### 4.1.8. Analisis Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Dari kuisioner yang sudah terkumpul, berikut ini adalah tabel yang menjelaskan tanggapan dari seluruh responden atas variabel kepatuhan wajib pajak bagi pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan.

Tabel 4. 29 Analisis Jawaban Atas Pernyataan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Instrumen	SS	S	N	TS	STS	Skor	
						Aktual	Ideal
1	32	41	16	9	2	392	500
2	6	22	39	27	6	295	500
3	28	48	20	3	1	399	500
4	14	33	35	15	3	340	500
5	28	42	23	5	2	389	500
						1815	2500

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel hasil analisis variabel kepatuhan wajib pajak (Y), diperoleh total skor 1815 dengan skor terendah 1 dan skor tertinggi 5. Di bawah ini merupakan perhitungan rentang tingkat skor untuk membuat interval kategori variabel kepatuhan wajib pajak.

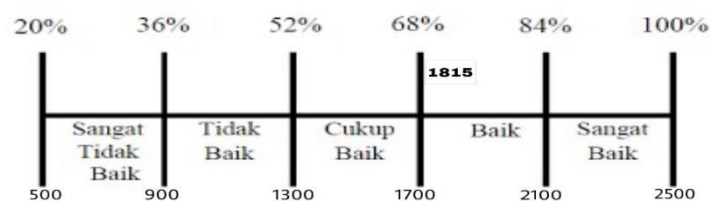
$$\text{Skor minimum} = 100 \times 5 \times 1 = 500$$

$$\text{Skor maksimum} = 100 \times 5 \times 5 = 2500$$

$$\text{Rentang skor} = 2500 - 500 = 2000$$

$$\text{Rentang antar tingkat} = 2000 / 5 = 400$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat dilihat pada gambar di bawah garis kontinum untuk menggambarkan posisi total skor tertinggi berdasarkan interval skor.



Gambar 4. 4 Garis Kontinum Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi berada dalam kategori baik. Skor jawaban dari masing-masing pertanyaan pada variabel sosialisasi perpajakan dapat dilihat secara lebih lengkap di bawah ini.

Tabel 4. 30 *Frekuensi Jawaban Pernyataan Y1.1*

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	32	32%
Setuju	41	41%
Netral	16	16%
Tidak Setuju	9	9%
Sangat Tidak Setuju	2	2%
Total	100	100%

Sumber : *Data primer yang diolah, 2022*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perolehan tanggapan responden atas pernyataan “Saya mendaftar NPWP karena kemauan sendiri “ sebanyak 32 orang atau 32% responden menyatakan sangat setuju atas pernyataan tersebut, 41 orang atau 41% responden menjawab setuju, 16 orang atau 16% responden menjawab netral, 9 orang atau 9% responden menjawab tidak setuju, dan 2 orang atau 2% menjawab sangat tidak setuju. Dari tanggapan tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan setuju bahwa mereka mendaftarkan NPWP karena kemauan sendiri.

Tabel 4. 31 *Frekuensi Jawaban Pernyataan Y1.2*

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	6	6%
Setuju	22	22%
Netral	39	39%
Tidak Setuju	27	27%
Sangat Tidak Setuju	6	6%
Total	100	100%

Sumber : *Data primer yang diolah, 2022*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perolehan tanggapan responden atas pernyataan “Saya mampu menghitung pajak sesuai penghasilan “ sebanyak 6 orang atau 6% responden menyatakan sangat setuju atas pernyataan tersebut, 22 orang atau 22% responden menjawab setuju, 39 orang atau 39% responden menjawab netral, 27 orang atau 27% responden menjawab tidak setuju, dan 6 orang atau 6% menjawab sangat tidak setuju. Dari tanggapan tersebut dapat dilihat bahwa pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan masih belum bisa menghitung pajaknya sesuai dengan penghasilan yang diperoleh.

Tabel 4. 32 *Frekuensi Jawaban Pernyataan Y1.3*

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	28	28%
Setuju	48	48%
Netral	20	20%
Tidak Setuju	3	3%
Sangat Tidak Setuju	1	1%
Total	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perolehan tanggapan responden atas pernyataan “Saya tidak memanipulasi data perpajakan untuk menghindari jumlah pajak yang terlalu besar” sebanyak 28 orang atau 28% responden menyatakan sangat setuju atas pernyataan tersebut, 48 orang atau 48% responden menjawab setuju, 20 orang atau 20% responden menjawab netral, 3 orang atau 3% responden menjawab tidak setuju, dan 1 orang atau 1% menjawab sangat tidak setuju. Dari tanggapan tersebut dapat dilihat bahwa pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan menulis pajak sesuai dengan penghasilan tanpa memanipulasi data.

Tabel 4. 33 *Frekuensi Jawaban Pernyataan Y1.4*

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	14	14%
Setuju	33	33%
Netral	35	35%
Tidak Setuju	15	15%
Sangat Tidak Setuju	3	3%
Total	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perolehan tanggapan responden atas pernyataan “Saya membayar pajak tepat” sebanyak 14 orang atau 14% responden menyatakan sangat setuju atas pernyataan tersebut, 33 orang atau 33% responden menjawab setuju, 35 orang atau 35% responden menjawab netral, 15 orang atau 15% responden menjawab tidak setuju, dan 3 orang atau 3% menjawab sangat tidak setuju. Dari tanggapan tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan membayar pajak tepat waktu.

Tabel 4. 34 Frekuensi Jawaban Pernyataan Y1.5

Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
Sangat Setuju	28	28%
Setuju	42	42%
Netral	23	23%
Tidak Setuju	5	5%
Sangat Tidak Setuju	2	2%
Total	100	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perolehan tanggapan responden atas pernyataan “Saya melaporkan SPT tepat waktu“ sebanyak 28 orang atau 28% responden menyatakan sangat setuju atas pernyataan tersebut, 42 orang atau 42% responden menjawab setuju, 23 orang atau 23% responden menjawab netral, 5 orang atau 5% responden menjawab tidak setuju, dan 2 orang atau 2% menjawab sangat tidak setuju. Dari tanggapan tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan telah melaporkan SPT tepat waktu.

## 4.2. Uji Prasyarat Analisis

### 4.2.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji keabsahan instrumen penelitian dalam suatu kuesioner sebelum kuesioner dibagikan kepada responden. Jika instrumen suatu penelitian diuji dan telah valid, dapat dikatakan bahwa alat ukur penelitian tersebut dapat membantu peneliti dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan (Andrew & Sari, 2021).

Uji validitas sebaiknya dilakukan pada tiap butir pertanyaan dengan membandingkan hasil  $r$  hitung dengan  $r$  tabel dimana degree of freedom ( $df$ ) =  $n - 2$  dengan sig 5%. Jika hasil menunjukkan  $r$  hitung >  $r$  tabel maka data dapat dikatakan valid.

Pada penelitian ini, responden yang diperoleh berjumlah 100, maka  $df = 100 - 2 = 98$ . Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%, maka nilai  $r$  tabel adalah 0.197. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil uji validitas dengan menggunakan program *IBM SPSS Statistics 26*.

Tabel 4. 35 Hasil Uji Peran Validitas Insentif Pajak

Butir Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Item pernyataan 1	0.597	0.197	Valid
Item pernyataan 2	0.590	0.197	Valid
Item pernyataan 3	0.631	0.197	Valid
Item pernyataan 4	0.617	0.197	Valid
Item pernyataan 5	0.457	0.197	Valid

Sumber : Data yang diolah, 2022

Tabel di atas menunjukkan hasil uji validitas dari setiap pernyataan dari variabel insentif pajak. Dapat dilihat bahwa pengujian terhadap 5 butir pernyataan memberikan hasil yang valid karena  $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ . Dapat disimpulkan bahwa 5 pernyataan pada variabel insentif pajak seluruhnya valid.

Tabel 4. 36 Hasil Uji Peran Validitas Pengetahuan Perpajakan

Butir Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Item pernyataan 1	0.871	0.197	Valid
Item pernyataan 2	0.745	0.197	Valid
Item pernyataan 3	0.724	0.197	Valid
Item pernyataan 4	0.856	0.197	Valid
Item pernyataan 5	0.785	0.197	Valid

Sumber : Data yang diolah, 2022

Tabel di atas menunjukkan hasil uji validitas dari setiap pernyataan dari variabel pengetahuan perpajakan. Dapat dilihat bahwa pengujian terhadap 5 butir pernyataan memberikan hasil yang valid karena  $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ . Dapat disimpulkan bahwa 5 pernyataan pada variabel pengetahuan perpajakan seluruhnya valid.

Tabel 4. 37 Hasil Uji Peran Validitas Sosialisasi Perpajakan

Butir Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Item pernyataan 1	0.423	0.197	Valid
Item pernyataan 2	0.654	0.197	Valid
Item pernyataan 3	0.733	0.197	Valid
Item pernyataan 4	0.844	0.197	Valid
Item pernyataan 5	0.866	0.197	Valid
Item pernyataan 6	0.861	0.197	Valid
Item pernyataan 7	0.795	0.197	Valid

Sumber : Data yang diolah, 2022

Tabel di atas menunjukkan hasil uji validitas dari setiap pernyataan dari variabel sosialisasi perpajakan. Dapat dilihat bahwa pengujian terhadap 7 butir pernyataan memberikan hasil yang valid karena  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Dapat disimpulkan bahwa 7 pernyataan pada variabel sosialisasi perpajakan seluruhnya valid.

Tabel 4. 38 Hasil Uji Peran Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Butir Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Item pernyataan 1	0.706	0.197	Valid
Item pernyataan 2	0.730	0.197	Valid
Item pernyataan 3	0.738	0.197	Valid
Item pernyataan 4	0.693	0.197	Valid
Item pernyataan 5	0.791	0.197	Valid

Sumber : Data yang diolah, 2022

Tabel di atas menunjukkan hasil uji validitas dari setiap pernyataan dari variabel kepatuhan wajib pajak. Dapat dilihat bahwa pengujian terhadap 5 butir pernyataan memberikan hasil yang valid karena  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Dapat disimpulkan bahwa 5 pernyataan pada variabel kepatuhan wajib pajak seluruhnya valid.

#### 4.2.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau struktur. Sebuah kuisioner dianggap reliabel atau handal jika jawaban dari responden atas suatu pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Sasongko & Wijayanti, 2017). Diuji dengan menggunakan rumus koefisien *Cronbach's Alpha*, dimana nilai *Cronbach's Alpha*  $>$  0,70 sehingga dapat dikatakan suatu pernyataan atau pertanyaan itu reliabel. Berikut ini adalah hasil uji reliabilitas seluruh item pernyataan dalam setiap variabel dengan menggunakan program *IBM SPSS Statistics 26*.

Tabel 4. 39 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien Reabilitas	Nilai Kritis	Keterangan
Insentif Pajak (X1)	0.880	0.70	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X2)	0.856	0.70	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X3)	0.878	0.70	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.780	0.70	Reliabel

Sumber Data primer diolah, 2022

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai *Cronbach's Alpha* variabel insentif pajak sebesar 0.880. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan nilai kritis sebesar 0,70 ( $0,880 > 0,70$ ). Dapat disimpulkan bahwa variabel insentif pajak reliabel.



Tabel di atas juga menunjukkan hasil uji reliabilitas terhadap variabel pengetahuan perpajakan dan menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,856. Nilai tersebut lebih besar daripada nilai kritis sebesar 0,70 ( $0,856 > 0,70$ ) maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan reliabel.

Variabel sosialisasi perpajakan menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,878 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari nilai kritis sebesar 0,70 ( $0,878 > 0,70$ ) dan dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan reliabel.

Variabel kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,780. Nilai tersebut lebih besar dari nilai kritis sebesar 0,70 ( $0,780 > 0,70$ ) maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak reliabel.

### 4.2.3. Uji Asumsi Klasik

#### 4.2.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas yang dilakukan terhadap suatu data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dipakai itu berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Metode ini dilakukan dengan cara membandingkan frekuensi kumulatif distribusi teoritik dengan frekuensi kumulatif distribusi empirik. Data dikatakan berdistribusi normal apabila  $Asymp. Sig > 0.05$ . (Sasongko & Wijayanti, 2017).

Tabel 4. 40 Hasil Uji Normalitas Menggunakan KS

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.14306357
Most Extreme Differences	Absolute	.077
	Positive	.062
	Negative	-.077
Test Statistic		.077
Asymp. Sig. (2-tailed)		.155 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

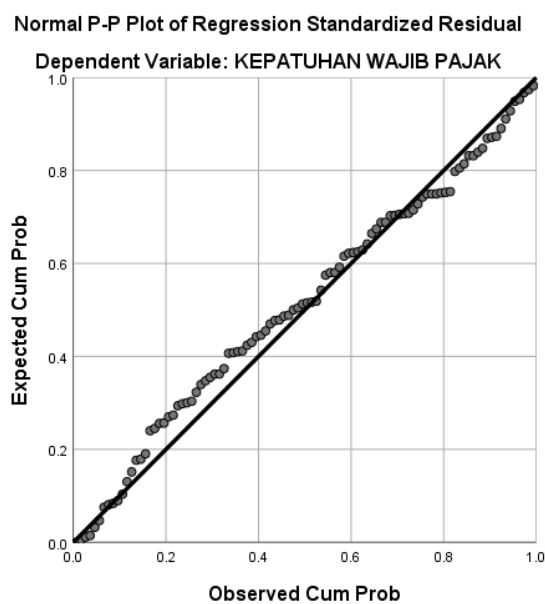
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2022

Pada tabel hasil uji normalitas di atas terlihat hasil Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0.155. nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang membuktikan bahwa distribusi data pada variabel insentif pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak berdistribusi secara normal dan dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh baik dan layak untuk digunakan dalam penelitian.

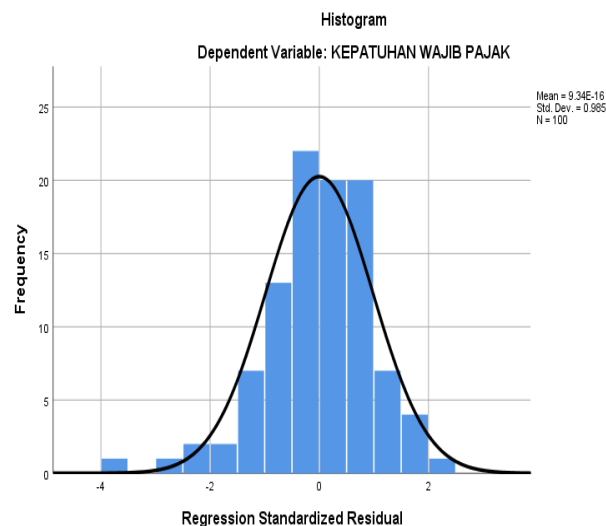
Metode lainnya yang dapat digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan menggunakan grafik normal plot dengan syarat yang harus dipenuhi adalah titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, jika syarat sudah terpenuhi maka dapat dikatakan data berdistribusi normal.



Gambar 4. 5 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Normal Plot

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil dengan menggunakan metode grafik normal plot di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dengan menggunakan metode grafik normal plot berdistribusi dengan normal.



Gambar 4. 6 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik Histogram

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan pada grafik histogram, terlihat bahwa grafik histogram berbentuk seperti lonceng arahnya tidak condong ke kiri atau kanan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi baik dan layak untuk dipakai dalam penelitian karena sudah memenuhi kriteria uji normalitas.

Dari kedua jenis metode yang digunakan, keduanya menunjukkan hasil bahwa data berdistribusi normal dan dapat digunakan untuk penelitian.

#### 4.2.3.2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi menemukan hubungan antar variabel independen atau variabel bebas. Pengaruh multikolinieritas ini menyebabkan variabilitas yang tinggi pada sampel (Ghozali, 2016). Dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas apabila nilai *Variable Inflation Factor* (VIF)  $< 10$  dan nilai toleransi atau tolerance  $> 0.10$ . Berikut adalah tabel yang menunjukkan hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan program *IBM SPSS Statistics 26*.

Tabel 4. 41 Hasil Uji Multikolinieritas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	INSENTIF PAJAK	.586	1.708
	PENGETAHUAN PERPAJAKAN	.474	2.108
	SOSIALISASI PAJAK	.407	2.455

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

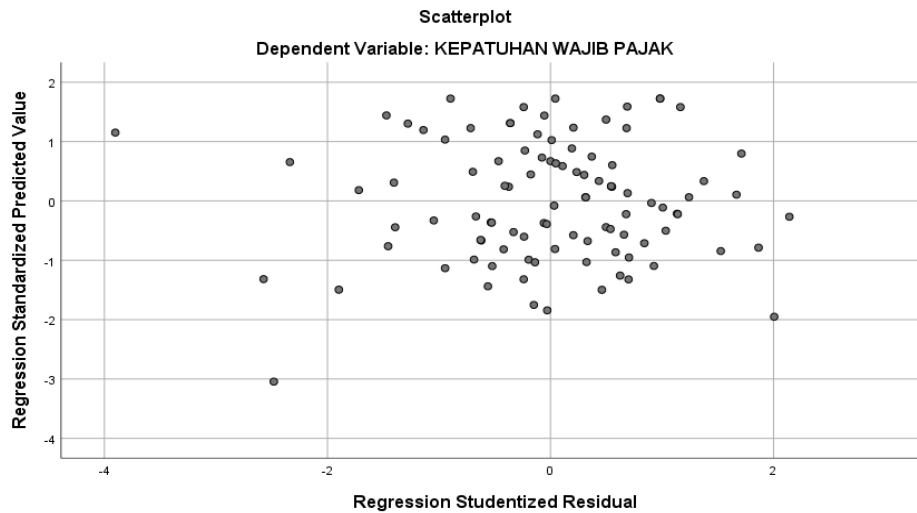
Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diliaht bahwa pada variabel insentif pajak nilai VIF 1.708 dimana nilai tersebut lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance sebesar 0.586 lebih besar dari 0.10 yang berarti bahwa pada variabel insentif pajak tidak terjadi multikolinieritas. Nilai VIF variabel pengetahuan perpajakan sebesar 2.108 lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance sebesar 0.474 lebih besar dari 0.10 maka, variabel pengetahuan perpajakan tidak terjadi multikolinieritas. Nilai VIF variabel sosialisasi pajak sebesar 2.455 lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance sebesar 0.407 lebih besar dari 0.10, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada variabel sosialisasi pajak. Dengan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi ini.

#### 4.2.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk memeriksa adanya ketidaksamaan varians dari satu residu ke pengamatan yang lain. Model regresi harus memenuhi persyaratan seperti kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homokedastisitas. Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, misalnya seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya. (Latief, *et al*, 2020).

Berikut adalah hasil dari uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan menggunakan program *IBM SPSS Statistics 26*.



Gambar 4. 7 Scatterplot  
(data primer yang diolah, 2022)

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa di dalam scatterplot tersebut titik-titik terlihat di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Titik-titik tersebut juga terlihat tidak memiliki pola atau tersebar dengan acak. Hal tersebut sudah memenuhi kriteria persyaatan yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa regresi yang baik adalah regresi yang ada dalam posisi homoskedastisitas yang dapat dilihat dengan persebaran titik-titik secara acak berada di bawah atau di atas angka 0 pada sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Metode lainnya untuk menguji heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji gelsjer. Uji ini dilakukan dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independent lainnya. Model persamaan regresi dapat dikatakan homokedastisitas apabila nilai  $\text{sig} > 0.05$ .

Tabel 4. 42 Hasil Uji Glesjer

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.398	.978		2.452	.016
	INSENTIF PAJAK	-.033	.057	-.077	-.582	.562
	PENGETAHUAN PERPAJAKAN	-.075	.055	-.201	-1.375	.172
	SOSIALISASI PAJAK	.067	.061	.174	1.104	.272

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Pada tabel di atas terlihat nilai sig setiap variabel. Pada variabel insentif pajak nilai sig sebesar  $0.562 > 0.05$ , variabel pengetahuan perpajakan sebesar  $0.172 > 0.05$  dan variabel sosialisasi pajak memiliki nilai sig sebesar  $0.272 > 0.05$ . hal tersebut dapat diartikan bahwa model regresi baik karena tidak terjadi heteroskedastisitas. Dibuktikan dengan uji glesjer dimana setiap variabel memiliki nilai sig di atas 0.05. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, dibuktikan dengan dua kali pengujian yaitu scatterplot dan dan uji glesjer.

### 4.3. Uji Hipotesis

#### 4.3.1. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengetahui seberapa baik ksemua variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Semakin tinggi angka koefisien determinasi maka semakin kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hal ini berarti variabel independen menyediakan sebagian besar informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016).

Tabel 4. 43 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.790 <sup>a</sup>	.624	.612	2.17629	1.912

a. Predictors: (Constant), SOSIALISASI PAJAK, INSENTIF PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Pada tabel di atas dapat diliaht hasil pengujian koefisin determinasi yang menunjukkan *Adjusted R Square* sebesar 0.612. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 61,2% kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan melallui variabel insentif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi pajak sedangkan sisa dari 61,2% yaitu 38,8% adalah faktor diluar penelitian ini.

#### 4.3.2. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Persyaratan untuk uji t adalah sebagai berikut :

- 1) Jika  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  atau nilai sig  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak
- 2) Jika  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  atau nilai sig  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima

Tabel 4. 44 Hasil Uji Parsial (Uji t)

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.923	1.495		.617	.538
	INSENTIF PAJAK	.298	.087	.280	3.420	.001
	PENGETAHUAN PERPAJAKAN	.395	.083	.430	4.734	.000
	SOSIALISASI PAJAK	.186	.093	.197	2.009	.047

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2022

### 1) Pengujian H1 (Hipotesis pertama)

Pada tabel 4.42. dapat dilihat hasil uji parsial dengan hasil t hitung pada variabel insentif pajak sebesar 3.420, nilai tersebut lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 1.66055 ( $3.420 > 1.66055$ ) dan nilai sig sebesar 0.001 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 ( $0.001 < 0.05$ ). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan Ho ditolak yang mengartikan secara parsial atau individu variabel insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis pertama (H1) yang mengungkapkan bahwa insentif pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.

### 2) Pengujian H2 (Hipotesis kedua)

Selanjutnya adalah hasil uji parsial dengan hasil t hitung pada variabel pengetahuan perpajakan sebesar 4.734, nilai tersebut lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 1.66055 ( $4.734 > 1.66055$ ) dan nilai sig sebesar 0.000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 ( $0.000 < 0.05$ ). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H2 diterima dan Ho ditolak yang mengartikan secara parsial pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis kedua (H2) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

### 3) Pengujian H3 (Hipotesis ketiga)

Terakhir adalah hasil uji parsial dengan hasil t hitung pada variabel sosialisasi pajak sebesar 2.009, nilai tersebut lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 1.66055 ( $2.009 > 1.66055$ )

dan nilai sig 0.047 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 ( $0.047 < 0.05$ ). Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H3 diterima dan Ho ditolak yang mengartikan secara parsial variabel sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis ketiga yang mengungkapkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

#### 4.3.3. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan kedalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Persyaratan pengujian uji simultan adalah sebagai berikut :

1. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau nilai sig  $< 0.05$  maka Ho diterima.
2. Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau nilai sig  $> 0.05$  maka Ho diterima

Dalam menggunakan nilai f tabel,  $\alpha$  yang digunakan adalah 0,05 dengan *degree of freedom* untuk numerator  $k-1=4-1=3$  dan denominator  $n-k= 100-4= 96$ . Sehingga diperoleh nilai f tabel sebesar 2,69.

Tabel 4. 45 Hasil Uji Simultan

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	754.071	3	251.357	53.071	.000 <sup>b</sup>
	Residual	454.679	96	4.736		
	Total	1208.750	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), SOSIALISASI PAJAK, INSENTIF PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2022

Berdasarkan pada tabel di atas maka dapat dilihat bahwa nilai F hitung yang didapatkan sebesar 53.071. hal tersebut menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel ( $53.071 > 2,69$ ) dan memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000 yang lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ( $0.000 < 0,05$ ). Dapat disimpulkan bahwa insentif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi pajak secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka H4 diterima.



#### 4.4. Pembahasan

##### 4.4.1. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 4.42 didapatkan nilai koefisien B konstanta sebesar 1.923 dan koefisien B variabel 0.298 dengan persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 1.923 + 0.298X_1 + e$$

Nilai konstanta sebesar 1.923 seperti yang tertera pada persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa insentif pajak akan tetap sebesar 1.923 tanpa adanya pengaruh dari variabel bebas. Variabel insentif pajak yang menunjukkan angka 0.298 menandakan jika setiap kenaikan 1 satuan variabel insentif pajak akan menaikkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0.298.

Setelah dilakukan analisis terhadap penelitian ini, ditunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti H1 ditolak. Berdasarkan pada hasil uji parsial, t hitung pada variabel insentif pajak sebesar 3.420, nilai tersebut lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 1.66055 ( $3.402 > 1.66055$ ) dan nilai sig sebesar 0.001 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 ( $0.0001 < 0.05$ ). Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi insentif pajak maka akan memberikan pengaruh kepada UMKM di daerah Tangerang Selatan untuk lebih patuh pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dijalankan oleh Latief, *et al* (2020) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa insentif pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0.007 lebih kecil dari 0.05 ( $0.007 < 0.05$ ).

Penelitian lain yang mendukung hasil dari penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Lastiningsih, Widiastuti & Fazriputri (2021). Dari penelitian tersebut diperoleh hasil uji parsial insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 ( $0.000 < 0.05$ ) yang menunjukkan bahwa insentif pajak memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak UMKM.

Dengan adanya pemberian insentif pajak dapat memberikan kemudahan dalam penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh terutang. Indikator pertama yaitu keadilan dalam pemberian insentif pajak yang terkait dengan keadilan pemerintah dalam memberikan insentif

bagi sektor UMKM sebagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu para pelaku UMKM dan diwakilkan dengan tiga pernyataan. Tanggapan dari responden untuk pernyataan pertama mengindikasikan bahwa wajib pajak sangat mengharapkan agar pemerintah memberikan perhatian terhadap insentif yang berkeadilan dan melindungi sektor usaha terutama UMKM. Pernyataan kedua terkait dengan kemudahan syarat dan ketentuan dalam mengajukan insentif pajak mudah. Tanggapan yang diperoleh dari responden menunjukkan bahwa syarat dan ketentuan mendapatkan insentif pajak mudah, ini berarti pemerintah telah adil dalam memberikan insentif pajak karena memberikan syarat dan ketentuan yang mudah. Pernyataan ketiga yaitu dengan diberikannya insentif pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Didapatkan tanggapan dari responden bahwa dengan pemerintah memberikan insentif pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Indikator kedua adalah dampak insentif pajak yang dijabarkan dengan dua pernyataan. Dari kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif pajak memberikan dampak positif yaitu membantu usaha pelaku UMKM dan juga memberikan motivasi untuk pelaku UMKM melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tepat waktu.

#### **4.4.2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan tabel 4.42 didapatkan nilai koefisien B konstanta sebesar 1.923 dan koefisien B variabel 0.395 dengan persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 1.923 + 0,395X_2 + e$$

Nilai konstanta sebesar 1.923 seperti yang tertera pada persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan akan tetap sebesar 1.923 tanpa adanya pengaruh dari variabel bebas. Variabel pengetahuan perpajakan yang menunjukkan angka 0.395 menandakan jika setiap kenaikan 1 satuan variabel pengetahuan akan menaikkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0.395.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (H2). Ditunjukkan dari hasil uji parsial t hitung pada variabel pengetahuan perpajakan sebesar 4.735, nilai tersebut lebih besar dari t tabel yaitu sebesar 1.66055 ( $4.735 > 1.66055$ ) dan memiliki nilai sig sebesar 0.000 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 ( $0.000 < 0.05$ ).

Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka akan memberikan pengaruh kepada UMKM di Kota Tangerang Selatan untuk lebih mematuhi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wujarso, Saprudin & Napitupulu (2020) dimana hasilnya variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan nilai signifikansi sebesar 0.047 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 ( $0.047 < 0.05$ ).

Penelitian lain yang mendukung hasil dari penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Jawa *et al* (2021). Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan nilai signifikansi 0.000 yang lebih kecil dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan menurut Indrawan dan Bani (2018) menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan serta pemahaman mengenai perpajakan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Jika mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang prosedur dan peraturan perpajakan, maka akan mempermudah mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Teori *planned behaviour* berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Komponen yang berkaitan dengan pengetahuan perpajakan adalah bagaimana Dirjen Pajak sebagai pihak eksternal memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai peraturan atau kebijakan baru tentang insentif pajak dan ini termasuk ke dalam komponen (*perceived behavior control*) sehingga kepatuhan wajib pajak seorang wajib pajak akan meningkat ketika ada dukungan dari tindakan eksternal. Setelah mendapatkan informasi mengenai pengetahuan perpajakan, seorang wajib pajak akan bereaksi terhadap peraturan atau kebijakan tersebut (*subjective norm*) dan kemudian Wajib Pajak akan menentukan sikap (*attitude*) apakah ia akan taat atau tidak taat terhadap peraturan peraturan. Teori *planned behaviour* ini akan memperkuat hipotesis kedua dalam penelitian ini.

#### **4.4.3. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan tabel 4.42 didapatkan nilai koefisien B konstanta sebesar 1.923 dan koefisien B variabel 0.186 dengan persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 1.923 + 0,186X_3 + e$$

Nilai konstanta sebesar 1.923 seperti yang tertera pada persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa sosialisasi pajak akan tetap sebesar 1.923 tanpa adanya pengaruh dari variabel bebas. Variabel sosialisasi pajak yang menunjukkan angka 0.186 menandakan jika setiap kenaikan 1 satuan variabel sosialisasi pajak akan menaikkan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0.186.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap penelitian ini dihasilkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (H3). Berdasarkan hasil uji parsial, didapatkan hasil  $t$  hitung pada variabel sosialisasi pajak sebesar 1.66055 ( $2.009 > 1.66055$ ) dan nilai sig sebesar 0.047 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 ( $0.047 < 0.05$ ). Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka akan memberikan pengaruh kepada UMKM di Tangerang Selatan untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andrew & Sari (2021), penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa sosialisasi mengenai pajak insentif PMK 86/2020 berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai hasil sig yang diperoleh sebesar 0.015 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 ( $0.015 < 0.05$ ).

Penelitian lain yang mendukung hasil ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Mudiarti & Mulyani (2020) yang mendapatkan hasil sosialisasi yang dilakukan mengenai PMK No. 86 tahun 2020 tentang insentif pajak berpengaruh positif terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan hasil sig 0.031 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 ( $0.031 < 0.05$ ).

Teori *planned behaviour* berkaitan erat dengan kepatuhan wajib pajak dengan salah satu komponennya yaitu niat dan norma subjektif, kedua komponen tersebut tidak tiba-tiba muncul begitu saja namun harus didukung oleh tindakan-tindakan eksternal (*perceived behavior control*) dimana pihak eksternal tersebut adalah Direktorat Jendral Pajak yang memberikan hak kepada wajib pajak berupa sosialisasi pajak itu sendiri yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan baru berupa insentif pajak yang akan meningkatkan kepatuhan pajak sesuai dengan teori *planned behaviour* akan memperkuat hipotesis ketiga dalam penelitian ini.

#### **4.4.4. Pengaruh Insentif Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan pada tabel 4.41, maka dapat disimpulkan bahwa nilai  $F$  hitung sebesar 53.071. Hal tersebut menunjukkan bahwa  $F$  hitung lebih besar dari  $F$  tabel ( $53.071 > 2,69$ ) dan

memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000 yang lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 ( $0.000 < 0,05$ ). Dapat disimpulkan bahwa insentif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi pajak secara bersama-sama atau secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari tiga variabel tersebut, variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai yang paling tinggi pada hasil uji parsial. Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang paling penting dan tentunya harus dimiliki oleh seorang wajib pajak. Dengan tingginya pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, maka wajib pajak akan memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan, prosedur, sistem perpajakan di Indonesia, dan pengetahuan tentang fungsi perpajakan akan memudahkan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Memahami aturan umum dan prosedur perpajakan akan mengurangi kesalahan Wajib Pajak dalam mengisi dan melaporkan SPT, menghitung jumlah pajak yang terhutang, dan mengajukan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel insentif pajak, pengetahuan perpajakan, dan sosialisasi pajak berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketiga variabel tersebut merupakan beberapa faktor yang mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang Selatan.

Teori *planned behaviour* menjelaskan tiga bagian penting dari kepatuhan yang pertama adalah sikap (*attitude*) ketika wajib pajak menentukan sikap akan patuh atau tidak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya adalah norma subjektif (*subjective norm*) ketika norma dapat menghasilkan kesadaran bagi wajib pajak untuk taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ketiga adalah mengendalikan perilaku (*perceived behavioral control*) dimana wajib pajak dapat mengendalikan perilakunya dari dalam diri mereka sendiri ataupun dari pihak luar yang dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan bagi wajib pajak dapat muncul melalui niat, norma subjektif, dan juga dukungan dari pihak eksternal. Wajib Pajak akan mendapatkan sosialisasi dan pengetahuan mengenai insentif pajak dari pihak eksternal yaitu Direktorat Jendral Pajak (DJP) kemudian wajib pajak akan meyakinkan diri bahwa insentif pajak itu akan memberikan dampak yang baik terhadap kelangsungan usahanya. Setelah itu wajib pajak akan menentukan sikap untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) merupakan teori yang mengungkapkan keadaan atau reaksi seseorang terhadap kewajiban atau aturan yang diberikan. Dikaitkan dengan perpajakan, kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran atau

motivasi wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang tentunya tetap berlandaskan pada peraturan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, kesadaran wajib pajak diperoleh melalui motivasi yang diberikan oleh pihak eksternal yaitu Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam memberikan sosialisasi dan pengetahuan mengenai peraturan pajak terkait insentif pajak. Sosialisasi dan pengetahuan tentang insentif pajak tersebut yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kedua teori ini akan memperkuat hipotesis keempat dalam penelitian ini.

